

Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Neraca Pada CV. Kamdatu Palembang

Christina_Mahasiswa (fideliachristina@yahoo.com Mahasiswa)
Lili Syafitri_Dosen (lili.syafitri@rocketmail.com Dosen)
Jurusan Akuntansi S1
STIE MDP

Abstrak : CV. Kamdatu melakukan kegiatan perdagangan barang dan jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruh Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Laporan Neraca pada CV. Kamdatu Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dan kualitatif yang akan memberikan gambaran mengenai Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan perusahaan serta Pengaruh Penerapan Akuntansi PPN terhadap Laporan Neraca. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Kamdatu belum menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, karena tidak adanya penjurnalan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam setiap transaksi keuangan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai, tidak adanya penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan dalam Laporan Neraca tidak muncul akun Hutang PPN.

Kata Kunci : Akuntansi Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Laporan Neraca.

Abstract : CV Kamdatu is one of the company that should be charged of Value Added Tax (VAT). The purpose of this research is to know about Accounting Application of Value Added Tax (VAT) and the effect of Value Added Tax to Balance Sheet in CV. Kamdatu Palembang. This research uses descriptive and qualitative research method, so that it will show the application of Value Added Tax and also the effect to balance sheet. The result of this research shows that CV. Kamdatu did not apply Value Added Tax Accounting System yet, it is because of there is no journal ledger based on financial accounting standards in every financial transaction which is related to value added tax, so income and expenditure tax account did not show up.

Key Words : Accounting Tax, Value Added Tax, Balance Sheet.

1 PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut.

CV. Kamdatu Palembang merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan jasa. Perdagangan barang yang dilakukan meliputi perabot rumah tangga, dan furniture seperti sofa, spring bed, lemari pakaian, dan jasa yang

dilakukan meliputi pekerjaan interior ruangan.

Pencatatan yang terjadi pada perusahaan adalah pada Pajak Masukan yaitu pengkreditan tidak sesuai dengan masa pajaknya dan pada Pajak Keluaran adalah berbedanya saat penyerahan barang kena pajak dan saat pembuatan faktur pajak. Faktur pajak dibuat berdasarkan permintaan pembeli. Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Neraca Pada CV. Kamdatu Palembang”**.

2 LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Akuntansi

Ada beberapa pengertian Akuntansi yang dikemukakan oleh para pakar diantaranya menurut *American Accounting Association* dikutip dari Soemarso S.R (2004, h.3) Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”.

2.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari suatu proses akuntansi untuk menyediakan informasi keuangan dari suatu perusahaan dan yang menjadi tanggung jawab manajemen kepada pihak-pihak internal maupun eksternal, maka agar laporan keuangan yang disusun tersebut dapat memenuhi kebutuhan para pemakainya haruslah berdasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku umum (*generally accepted accounting principles*).

2.3 Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu pemerintah semakin giat mendorong masyarakat untuk membayar pajaknya dan wajib pajak sangat berperan dalam pelaksanaan pajak tersebut.

Menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009 : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

2.4 Faktur Pajak

Menurut Waluyo (2009, h.270) pengertian “Faktur Pajak adalah bukti

pungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”.

Terdapat 3 (tiga) jenis faktur pajak, yaitu :

1. Faktur pajak standar
2. Faktur pajak gabungan
3. Faktur pajak sederhana.

2.5 Pengakuan dan pengukuran PPN.

Pajak Pertambahan Nilai timbul akibat adanya transaksi pembelian dan penjualan terhadap Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak. Apabila pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian BKP maka akan dikenakan Pajak Masukan. Selanjutnya bila PKP tersebut melakukan penjualan atas BKP tersebut maka mereka berhak untuk melakukan pemungutan PPN yang telah mereka setor sebelumnya dan hal ini merupakan Pajak Keluaran.

2.6 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Di dalam akuntansi komersial tidak mengatur tersendiri perilaku akuntansi khusus untuk PPN maupun PPnBM, PSAK tahun 2007 hanya mengatur Akuntansi Pajak Penghasilan. Namun demikian baik dalam akuntansi komersial maupun dalam akuntansi pajak terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan yang harus dipersiapkan antara lain :

1. Akun Pajak Masukan
Untuk mencatat besarnya Pajak Masukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian.
2. Akun Pajak Keluaran
Pada akun ini untuk mencatat Pajak Keluaran yang dipungut atau disetorkan ke Kas Negara atas transaksi.

3 METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan kualitatif yang akan memberikan

gambaran mengenai Penerapan Akuntansi PPN yang dilakukan perusahaan dan menjelaskan proses penerapan tersebut apakah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan UU No. 42 tahun 2009 serta Pengaruh Penerapan Akuntansi PPN terhadap Laporan Neraca.

3.2 Objek / Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. Kamdatu Tahun 2011.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah CV. Kamdatu merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan jasa. Perdagangan barang yang dilakukan meliputi perabot rumah tangga, dan furniture seperti sofa, spring bed, lemari pakaian, dan jasa yang dilakukan meliputi pekerjaan interior ruangan. Ditinjau dari kegiatan usahanya, CV. Kamdatu melakukan kegiatan perdagangan barang dan jasa yang dikenakan PPN.

3.3 Pemilihan Informan Kunci

Pada penelitian ini menggunakan informan sebagai sumber data penelitian, tidak menggunakan populasi dan sampel karena bentuk penelitiannya merupakan penelitian deskriptif, untuk memperoleh data secara jelas, akurat, dan terpercaya dibutuhkan informan, yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah karyawan bagian administrasi pajak CV. Kamdatu.

3.4 Jenis Data

1. Data Primer

Data primer yang didapat dari CV. Kamdatu adalah berupa sejarah singkat perusahaan, fungsi masing-masing bagian yang ada dalam struktur organisasi perusahaan, dan metode yang dipakai perusahaan dalam mencatat transaksi

keuangan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang didapat dari CV. Kamdatu adalah Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Tahun 2011, rekap PPN Masukan serta PPN Keluaran Tahun 2011, dan Laporan Neraca Tahun 2011.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Dokumentasi

Dokumentasi pada data yang terkait dengan PPN maupun penyajiannya dalam Laporan Keuangan, akan dicatat maupun di-copy secara elektronik langsung dari dokumen atau laporan yang ada pada obyek penelitian.

2. Metode Wawancara

Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang ingin diketahui oleh peneliti yang tidak didapatkan dari laporan atau data yang terkait dengan masalah yang akan diteliti, wawancara akan dilakukan dengan memberikan pertanyaan lisan kepada subyek penelitian dalam hal ini karyawan bagian Akuntansi dan Administrasi Pajak pada CV. Kamdatu.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk melakukan analisa data yaitu mengolah dan menganalisa data tersebut dengan menggunakan analisa deskriptif yang menggambarkan karakteristik suatu masalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder, kemudian membandingkan landasan teori yang ada pada bab 2 serta SAK dan UU No. 42 Tahun 2009 dengan penerapan Akuntansi PPN yang dilakukan CV. Kamdatu, lalu mengajukan kesimpulan yang logis berdasarkan hasil penelitian tersebut dan memberikan saran-saran.

4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

1. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan CV. Kamdatu dalam melakukan penghitungan terhadap Pajak Pertambahan Nilai adalah dengan menggunakan Harga Jual.

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan adalah 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk semua jenis Barang Kena Pajak (BKP).

3. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009

Perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang lebih bayar atau yang kurang bayar dapat dihitung berdasarkan data-data Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar yang berarti perusahaan berkewajiban membayar kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai kepada Kas Negara. Sedangkan, apabila Pajak Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan, maka Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar yang berarti perusahaan berhak menentukan apakah kelebihan pembayaran pajak tersebut akan direstitusi ataupun dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

4. Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai

Prosedur pembukuan yang dilakukan CV. Kamdatu berkaitan dengan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai adalah pembelian barang dan penjualan barang. Setiap transaksi yang terjadi dalam kegiatan usaha perusahaan, bagian keuangan wajib mencatat atau membukukannya.

Masalah yang timbul dalam pencatatan Pajak Masukan adalah berbedanya saat penerimaan barang kena pajak dan saat penerimaan faktur pajak. Dalam pencatatan

Pajak Keluaran, masalah yang terjadi juga tidak jauh berbeda dengan Pajak Masukan yaitu berbedanya saat penyerahan barang kena pajak dengan saat pembuatan faktur pajak.

Pencatatan yang dilakukan perusahaan tidak dibuat dalam bentuk jurnal yang menunjukkan sisi debit dan kredit, Pajak Masukan dan Pajak Keluaran hanya direkap perbulan untuk dapat menentukan apakah dalam masa pajak terjadi lebih bayar atau kurang bayar.

Berdasarkan hasil rekap Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Bulan Januari 2011 didapat total PPN Masukan bulan Januari sebesar Rp. 14.538.936,- dan total Pajak Keluaran Rp. 6.663.100,-. Perusahaan menghitung pada bulan Januari 2011 mengalami lebih bayar PPN :

PPN Masukan Jan 2011	Rp. 14.538.936
PPN Keluaran Jan 2011	<u>Rp. 6.663.100 -</u>
Lebih Bayar PPN	Rp. 7.875.836

Nilai lebih bayar PPN pada bulan Januari 2011 sebesar Rp. 7.875.836,- tersebut akan dikompensasikan oleh perusahaan pada masa pajak Februari 2011.

4.2 Pembahasan

1. Dasar Pengenaan Pajak

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari perusahaan serta tinjauan pustaka yang penulis paparkan pada Bab II, dasar pengenaan pajak yang dijadikan dasar dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Barang Kena Pajak sudah sesuai dengan dasar pengenaan pajak yang ada. Dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah harga jual, yaitu nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan perusahaan telah sesuai dengan

peraturan UU No. 42 tahun 2009 pasal 7 ayat 1 yaitu sebesar 10% (sepuluh persen).

3. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009

Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tidak seimbang, hal ini disebabkan karena Pajak Masukan yang terjadi dalam suatu periode tidak dibebankan secara langsung pada periode tersebut karena terlambat menerima faktur pajak masukan dari suplier, dan mengakibatkan pada bulan Januari, Februari, Maret, dan Mei PPN Masukannya selalu timbul lebih besar dari Pajak Keluarannya. Sehingga selalu timbul kelebihan pembayaran pajak dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2011.

Tidak seimbangnyanya Pajak Masukan yang diterima dengan Pajak Keluaran yang dilakukan oleh perusahaan juga disebabkan karena penundaan pembuatan faktur pajak keluaran oleh perusahaan atas permintaan pelanggan yang mengakibatkan kurang bayar pada bulan November dan Desember 2011.

Solusi untuk mengatasi hal ini, dari pihak perusahaan diharapkan dapat lebih tegas kepada suplier dalam hal penerimaan Faktur Pajak Masukan agar diserahkan kepada perusahaan sesuai periode terjadinya pembelian barang, dan dalam hal pembuatan Faktur Pajak Keluaran yang selama ini mengikuti permintaan pelanggan, diharapkan untuk kedepannya pihak perusahaan dapat memberikan pengertian kepada pelanggan bahwa pembuatan Faktur Pajak Keluaran harus dibuat sesuai dengan periode terjadinya transaksi penjualan.

4. Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan

Menurut peraturan perpajakan, pengkreditan pajak dapat dilakukan apabila PPN Masukannya dikategorikan sebagai PPN yang dapat dikreditkan dan bukan PPN yang tidak dapat dikreditkan. Semua PPN Masukan yang telah perusahaan setor ke Kas Negara merupakan PPN Masukan yang dapat dikreditkan. Mekanisme atau cara pengkreditan Pajak Masukan yang dilakukan

perusahaan yaitu berpedoman pada tanggal faktur pajak.

Dalam hal pelaporan SPT Masa PPN, CV. Kamdatu Palembang telah melaporkan tepat waktu yaitu setiap tanggal 20. Menurut penulis, hal ini sudah baik karena perusahaan sudah termasuk dalam Wajib Pajak yang taat pajak dan tidak terkena sanksi apabila terlambat melapor.

5. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa CV. Kamdatu belum menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, karena tidak adanya penjurnalan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dalam setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan sehingga tidak muncul akun Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, perusahaan hanya mencatat secara sederhana dengan merekap setiap faktur pajak baik faktur pajak masukan yang diterima saat pembelian Barang Kena Pajak, maupun faktur pajak keluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan saat penjualan Barang Kena Pajak.

Dengan dibuatnya jurnal untuk setiap transaksi pembelian Barang Kena Pajak (BKP) maupun transaksi penjualan Barang Kena Pajak, berfungsi bagi perusahaan sebagai fungsi analisis untuk menentukan perkiraan yang di debit dan perkiraan yang di kredit serta jumlahnya masing-masing, dan untuk mencatat aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai.

6. Penyajian Pajak Pertambahan Nilai Dalam Laporan Neraca CV. Kamdatu

Standar Akuntansi Keuangan sebagai himpunan prinsip, prosedur, metode dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan Laporan Keuangan juga mempunyai pengaruh sebagai dasar pengenaan akuntansi pada perhitungan Pajak Pertambahan Nilai. Keterlibatan Standar Akuntansi Keuangan dalam perhitungan PPN perusahaan tersebut karena CV. Kamdatu menggunakan Laporan Keuangan sebagai sarana untuk menyajikan informasi keuangan dari transaksi-transaksi

yang terjadi dalam perusahaan. Dari transaksi-transaksi tersebut pembayaran pajak merupakan transaksi yang mempengaruhi Laporan Keuangan. Sedangkan Laporan Keuangan itu sendiri akan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan.

CV. Kamdatu sebagai perusahaan yang menghasilkan Laporan Keuangan yang akan dipakai oleh berbagai pihak, maka di dalam semua transaksi termasuk perhitungan PPN selayaknya menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai dasar penerapan akuntansi dari transaksi-transaksi tersebut. Keterlibatan Standar Akuntansi Keuangan disebabkan karena komponen-komponen PPN yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran mengandung konsep atau pemikiran akuntansi. Mempertemukan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran seperti tertera dalam Undang-Undang yang berlaku seolah-olah merupakan realisasi dari prinsip penetapan beban dan pendapatan. Sehingga laporan keuangan yang disajikan wajar dan tidak menyesatkan pembaca laporan keuangan perusahaan.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian diketahui bahwa CV. Kamdatu belum menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, hal ini bisa dilihat dari tidak adanya penjurnalan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dalam setiap transaksi keuangan perusahaan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga tidak muncul akun Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, perusahaan hanya mencatat secara sederhana dengan merekap setiap faktur pajak baik faktur pajak masukan yang diterima saat pembelian Barang Kena Pajak, maupun faktur pajak keluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan saat penjualan Barang Kena Pajak.

Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap laporan neraca perusahaan. Pada laporan neraca CV. Kamdatu dapat dilihat tidak adanya keterangan hutang PPN padahal

seharusnya perusahaan menyajikan Hutang PPN karena pada akhir tahun perusahaan mengalami kurang bayar. Hal ini terjadi karena CV. Kamdatu belum menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dengan baik, tidak adanya penjurnalan yang menunjukkan sisi debit dan kredit serta akun Pajak Keluaran dan Pajak Masukan mengakibatkan dalam laporan neraca tidak muncul akun Hutang PPN.

5.2 Saran

Sebaiknya perusahaan menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dengan membuat jurnal untuk setiap transaksi pembelian Barang Kena Pajak maupun transaksi penjualan Barang Kena Pajak, dengan diterapkannya Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai berfungsi bagi perusahaan sebagai fungsi analisis untuk menentukan perkiraan yang di debit dan perkiraan yang di kredit serta jumlahnya masing-masing, dan untuk mencatat aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai.

Sebaiknya perusahaan menerapkan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, sehingga pada laporan neraca perusahaan dapat ditampilkan akun Hutang PPN yang merupakan Pajak Pertambahan Nilai terutang yang didapat dari selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agoes, Sukrisno, Estralita Trisnawati 2010, *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 2 Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- [2] Hermawan, Budi 2005, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Edisi ke-1, Fakultas Ekonomi Universitas Putra Indonesia, Cianjur.
- [3] Ikatan Akuntan Indonesia 2009, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.

- [4] Kieso, Donald.E, Jerry J Weygandt, Terry D.Warfield2008,*Akuntansi Intermediate*, Edisi Keduabelas, Erlangga, Jakarta.
- [5]Mardiasmo 2006, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2006, Andi, Yogyakarta. Purwono, Herry 2010, *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Erlangga, Jakarta.
- [6]Soemarso 2004, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Edisi Lima, Buku Satu, Salemba Empat, Jakarta.
- [7]Sukardji, Untung 2006, *Pajak Pertambahan Nilai* Edisi Revisi 2006, Rajawali Pers, Jakarta.
- [8]Sugiyono 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Edisi Kelimabelas, Alfabeta, Bandung.
- [9]Waluyo 2009, *Akuntansi Pajak*, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
- [10]Waluyo 2011, *Perpajakan Indonesia*, Buku 2 Edisi 10, Salemba Empat, Jakarta.
- [11]Warren, Carl.S., James M.Reeve, Philip E.Fees 2006, *Pengantar Akuntansi*, Edisi Keduapuluhsatu, Salemba Empat, Jakarta.